

## Official Development Assistance (ODA) Jepang kepada Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998)

Desak Nyoman Risma Riyandewi\*<sup>1</sup>, Stedi Wardoyo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Waseda University, Jepang

<sup>2</sup>Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

\*Email: desak.nyoman.r@mail.ugm.ac.id

### ABSTRACT

*The History of Japan and Indonesia Relations: Japanese ODA to Indonesia during the New Order Era (1966-1998). Official Development Assistance (ODA) is a foreign aid used by the member nations of the Development Assistance Committee (DAC) in the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). ODA is used to contribute to the economic development and prosperity of developing countries. Japan as one of the DAC member countries provides ODA to said developing countries, with a special focus on the Asia region - Indonesia being one of the priority recipients. This research focuses on Japan's ODA history, and the history of Japanese-Indonesian relations spanning the New Order era from 1966 to 1998. The methodology of research is qualitative, and based on historical data with the aim to explain Japan's ODA strategies with regards to Indonesia as well as the reason behind it. The resources used to acquire data are primary sources from official websites of the Japanese Ministry of Foreign Affairs, and secondary sources such as books and journals describing Japan's ODA to Indonesia. The findings of this research indicate the implementation of Japan's ODA to Indonesia serves several national interests, as well as identifies interdependencies between the countries. Whereas Japan provides ODA to Indonesia with the goal of improving the country's image on the world stage, as well as promoting mutual economic growth through investment and trade, Indonesia is also dependent on Japan's ODA for economic growth and infrastructural development - in summary the welfare of the country. In summary both countries benefit from the ODA aid and have developed closer ties thanks to its continuation.*

**Keywords:** ODA, OECD, National Interests, Interdependence, Indonesian-Japan history

### PENDAHULUAN

Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, Jepang berusaha memperbaiki hubungan dengan negara bekas jajahannya, termasuk Indonesia, melalui kontribusi terhadap pembangunan negara bekas jajahannya, terutama di kawasan Asia. Kebijakan luar negeri Jepang terhadap Indonesia dan negara Asia lainnya dimulai dengan pembayaran pampasan perang (Togo, 2010: 195). Perjanjian yang berisi tentang pembayaran kerugian perang oleh Jepang kepada negara bekas jajahan Jepang di kawasan Asia Tenggara dikenal dengan Perjanjian San Francisco, yang disetujui pada tahun 1951. Akan tetapi, karena Indonesia tidak meratifikasi perjanjian San Francisco tersebut, Jepang dan Indonesia mendiskusikan kembali kesepakatan pembayaran

pampasan perang, yang pada akhirnya disepakati tujuh tahun setelah ditetapkannya Perjanjian San Francisco. Jepang memulai hubungan kerja sama dengan Indonesia secara resmi sejak ditandatanganinya perjanjian perdamaian pada 20 Januari 1958.

Hasil konkret dari terjalinnya hubungan baik antara Jepang dan Indonesia dapat dilihat salah satunya pada banyaknya produk dan perusahaan Jepang di Indonesia. Berbagai produk buatan Jepang seperti produk elektronik, kendaraan, dan sebagainya dekat dengan kehidupan masyarakat di wilayah Indonesia. Bahkan sebagian besar sepeda motor di Indonesia merupakan buatan Jepang. Dari fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa kerja sama ekonomi Jepang dan Indonesia diwujudkan melalui kerja sama ekonomi berupa pengembangan pasar produk Jepang di Indonesia. Kerja sama bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang mempengaruhi hubungan Jepang dan Indonesia. Berbagai kerja sama ekonomi dapat berjalan karena Jepang melaksanakan proyek *Official Development Assistance* (ODA) di Indonesia.

*Official Development Assistance* (ODA) merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut bantuan asing yang disediakan oleh negara yang tergabung dalam *Development Assistance Committee* (DAC)<sup>1</sup> pada *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) sejak tahun 1960-an. ODA bertujuan untuk mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan negara berkembang. Jepang sebagai anggota OECD sejak tahun 1964 menjadi salah satu negara yang secara aktif memberikan ODA.

Indonesia merupakan salah satu negara yang diprioritaskan Jepang dalam kerja sama luar negerinya. Walaupun pernah terjadi demonstrasi anti Jepang di Jakarta pada tahun 1974, Jepang dan Indonesia tetap menjalin hubungan bilateral yang baik. Indonesia bahkan menjadi negara penerima ODA Jepang dalam jumlah yang besar. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Jepang pada tahun 1990, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai penerima ODA Jepang, meskipun Indonesia bukan negara yang paling membutuhkan ODA di dunia.

Tulisan ini fokus pada dua rumusan masalah, yaitu 1) Mengapa Jepang memprioritaskan Indonesia sebagai penerima ODA Jepang terutama pada masa Orde Baru tahun 1966-1998? dan 2) Bagaimana ODA Jepang mempengaruhi hubungan antara Jepang dan Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini membahas ODA dalam sejarah hubungan Jepang dan Indonesia pada masa Orde Baru (1966-1998). Hal yang dijelaskan adalah gambaran umum ODA Jepang, keadaan Jepang dan Indonesia dalam kerja sama bilateral, pelaksanaan ODA Jepang bagi Jepang dan Indonesia, dan alasan Jepang memberikan ODA kepada Indonesia pada masa Orde Baru.

Penjelasan tentang ODA Jepang terhadap Indonesia dapat dilihat pada beberapa penelitian. Bachtiar Alam dalam buku berjudul *Japan's ODA to Indonesia: ODA Statistical Data* tahun 2001 mendeskripsikan ODA Jepang sebagai data bantuan Jepang pada tahun 1966 hingga 1998 dalam bentuk tabel dan grafik, serta detail mengenai proyek ODA

---

<sup>1</sup> DAC merupakan Komite Bantuan Pembangunan, yang terdiri dari 30 negara yang bertujuan memberikan ODA kepada negara berkembang. DAC merupakan salah satu bagian di dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). OECD didirikan oleh beberapa negara seperti Inggris, Amerika, Jerman, dan sebagainya dengan tujuan mewadahi kebijakan terkait pembangunan ekonomi internasional.

Jepang pada rentangan tahun tersebut. Katsuhiko Maruyama menjelaskan hubungan Jepang dan Indonesia terkait dengan pembayaran pampasan perang dalam buku yang berjudul *Nihon Indonesia Kankei Nenpyou* (Kronologi Hubungan Jepang dan Indonesia) yang diterbitkan tahun 1979. Penelitian terkait ODA Jepang juga tertulis dalam jurnal seperti dalam *Japan's ODA at the Crossroads: Disbursement Patterns of Japan's Development Assistance to Southeast Asia* oleh Dennis Trinidad pada tahun 2007. Dennis yang dalam jurnalnya menjelaskan mengenai penyebaran ODA Jepang ke Asia Tenggara tahun 1985-2004, menyimpulkan bahwa dalam penyebaran bantuan asing oleh Jepang terdapat faktor eksternal seperti pengaruh Amerika dan faktor internal, yaitu kondisi domestik Jepang.

Dari sumber buku dan jurnal tersebut, diketahui bahwa Jepang menjalin kerja sama dengan Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya melalui ODA. Akan tetapi pembahasan mengenai peran ODA dalam sejarah hubungan Jepang dan Indonesia belum dijelaskan secara mendalam. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan lebih dalam mengenai ODA Jepang kepada Indonesia, dengan melihat peran ODA bagi Jepang dan Indonesia.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah fokus dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini fokus pada peran ODA Jepang dalam hubungan antara Jepang dan Indonesia. Penelitian lainnya seperti yang disebutkan di atas hanya menjelaskan deskripsi data ODA Jepang, hubungan Jepang dan Indonesia melalui pampasan perang, serta ODA Jepang terhadap Asia Tenggara. Akan tetapi, penelitian ini fokus pada peran ODA Jepang terhadap hubungan Jepang dan Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1966-1998, yang dijelaskan dengan menguraikan alasan Jepang memprioritaskan Indonesia sebagai penerima ODA Jepang, serta pengaruh ODA terhadap hubungan Jepang dan Indonesia.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berdasarkan pada tahapan penelitian sejarah, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, serta penulisan. Setelah topik ditentukan, yaitu ODA Jepang kepada Indonesia pada masa Orde Baru, berbagai sumber yang mendukung penulisan dikumpulkan.

Data primer yang digunakan adalah laporan resmi pemerintah Jepang "Whitebook" berjudul *Wa ga Kuni no Seifu Kaihatsu Enjo* (ODA Jepang), yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Jepang atau *Gaimushou Keizai Kyouryoku Kyoku* tahun 1988, 1992, 1994, serta situs resmi Kementerian Luar Negeri Jepang. Data sekunder berupa buku terutama yang diterbitkan dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris, misalnya *Nihon Gaikou no Subete* (Segalanya terkait Diplomasi Jepang) oleh Nobutoshi Nagano, *Japan's Foreign Policy: The Quest for a Proactive Policy 1945-2009* oleh Kazuhiko Togo. Data tersier berupa sumber dari internet dan jurnal seperti *Kaihatsu Enjo no Tenbou: Kokumin no Shiji to Nihon no Kouken* (Prospek Bantuan Pembangunan: Dukungan Publik dan Kontribusi Jepang) oleh Naoki Ando, *Japan Beyond 1970* oleh Kei Wakazumi, dan sebagainya digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya, fakta-fakta yang tertulis dalam berbagai sumber tersebut diverifikasi, diinterpretasi, dan dituliskan menjadi sejarah ODA Jepang kepada Indonesia pada masa Orde Baru (1966-1998). Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai ODA dalam sejarah hubungan Jepang dan Indonesia karena ODA merupakan salah satu instrumen yang mendukung terjalinnya hubungan yang baik antara Jepang dan Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ODA Jepang

ODA merupakan bentuk kontribusi dari Jepang kepada dunia internasional yang didasari pada kesadaran akan interdependensi antara negara maju dan berkembang. ODA Jepang memiliki karakteristik sebagai berikut (Nishigaki, 2003: 114):

- a. Dilaksanakan oleh pemerintah beserta perangkatnya,
- b. Memiliki tujuan utama untuk membangun perekonomian serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara berkembang,
- c. Memiliki syarat utama yaitu tidak memberikan beban yang besar kepada negara berkembang dalam mengembalikan pinjaman uang.

Berdasarkan hal tersebut, pada masa Orde Baru, Jepang melaksanakan proyek ODA yang terdiri dari tiga jenis, yaitu (Sakata, 2015: 4):

#### Hibah

Bantuan hibah merupakan bantuan berupa dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan ekonomi negara berkembang yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Jepang atau *Ministry of Foreign Affairs* (MOFA). Pada dasarnya bantuan hibah pada masa Orde Baru digunakan untuk pengembangan dalam berbagai bidang seperti asuransi, pertanian, dan sebagainya, termasuk bidang kebutuhan dasar manusia atau *basic human needs* (Sakata, 2015: 187).

#### Pinjaman

Pinjaman diberikan oleh Jepang melalui penetapan kebijakan jumlah pinjaman berdasarkan permintaan dari negara berkembang (Sakata, 2015: 222). Pinjaman tersebut berjangka panjang dan berbunga rendah. Pada masa Orde Baru, pinjaman diatur oleh Bank Jepang yaitu *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC). Jepang mulai memberikan ODA kepada Indonesia dalam bentuk pinjaman sejak tahun 1966.

#### Kerja Sama Teknik

Kerja sama teknik merupakan bentuk ODA dalam wujud pengembangan teknologi, pemberian pelatihan teknis, dan sebagainya (Gaimushou, 1994: 197). Pada masa Orde Baru, kerja sama teknik yang diberikan oleh pemerintah Jepang dinaungi oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Kerja sama teknik yang berupa pemberian pelatihan oleh para ahli dari Jepang kepada para pekerja, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar masyarakat yang mengikuti pelatihan dapat menerapkan ilmu yang diberikan untuk kemajuan negara.

Berdasarkan kondisi Indonesia, Jepang melaksanakan berbagai jenis ODA seperti berikut ini (Gaimushou, 1994: 50):

1. penjaminan keadilan dalam masyarakat, melalui perbaikan lingkungan hidup masyarakat miskin, pemberian bantuan kebutuhan dasar, serta upaya mengurangi kesenjangan sosial,
2. peningkatan mutu SDM dan pendidikan, dengan memfasilitasi pembangunan sistem sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik guru di sekolah maupun para buruh,
3. konservasi lingkungan, seperti hutan dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, konservasi lingkungan tempat tinggal penduduk, dan sebagainya,
4. bantuan pengaturan mengenai konstruksi industri, termasuk distribusi pengetahuan dan kemampuan dalam penguasaan teknologi,
5. bantuan fasilitas dasar yang mendukung bidang industri, berupa pembangunan listrik, sumber air, transportasi, dan pengembangan teknologi informasi.

Sesuai dengan uraian di atas, Jepang melaksanakan proyek ODA di Indonesia dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kesepakatan antara pemerintah Jepang dan Indonesia agar pelaksanaan ODA dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

#### **Pasang Surut ODA Jepang kepada Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1998)**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi prioritas penerima ODA Jepang. Jika seluruh ODA Jepang yang diterima Indonesia selama tahun 1966 hingga 1998 dijumlahkan, dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara penerima ODA Jepang terbanyak pada periode tersebut. Berikut ini adalah grafik jumlah ODA Jepang untuk Indonesia tahun 1966 hingga 1998:



Gambar 1. Grafik jumlah ODA Jepang untuk Indonesia tahun 1966 hingga 1998  
(Sumber data: [https://www.id.emb-japan.go.jp/oda/jp/datastat\\_01.htm](https://www.id.emb-japan.go.jp/oda/jp/datastat_01.htm))

Garis hitam pada grafik di atas menunjukkan total ODA Jepang untuk Indonesia dari tahun 1966 sampai 1998. Selama masa Orde Baru, jumlah ODA Jepang yang diterima Indonesia yang pada awalnya cenderung stabil, mengalami peningkatan yang signifikan memasuki pertengahan tahun 1980-an. Tepatnya sejak tahun 1987 hingga 1989 jumlah ODA yang diterima Indonesia mengalami kenaikan. Memasuki tahun 1990 hingga 1998,

jumlah ODA Jepang yang diterima Indonesia mengalami ketidakstabilan.

Kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan ODA Jepang adalah lima target ODA jangka menengah yang ditetapkan pada tahun 1978, yaitu (Ming, 2016: 46):

#### **Target ODA Jangka Menengah Pertama**

Target yang ditetapkan pada Juli 1978 ini mencakup tahun 1978 hingga 1980. Jumlah ODA Jepang yang pada tahun 1977 berjumlah 1,42 juta dolar ditargetkan menjadi dua kali lipat jumlah tersebut dalam waktu tiga tahun.

#### **Target ODA Jangka Menengah Kedua**

Target ODA yang ditetapkan pada Januari 1981 ini mencakup tahun 1981 hingga 1985. Pada tahun 1985 ditargetkan jumlah ODA menjadi dua kali lipat jumlah ODA pada tahun 1976 hingga 1980, yaitu mencapai 21,4 miliar dolar.

#### **Target ODA Jangka Menengah Ketiga**

Target yang disahkan pada September 1985 ini dan mencakup tahun 1986 sampai 1992. Pada tahun 1992 ODA ditargetkan harus melebihi 40 miliar dolar.

#### **Target ODA Jangka Menengah Keempat**

Target ODA ini ditetapkan pada Juni 1988, mencakup tahun 1988 hingga 1992, dengan target jumlah ODA sebesar 50 miliar dolar.

#### **Target ODA Jangka Menengah Kelima**

Target ini disahkan pada Juni 1993, mencakup tahun 1993 hingga 1997. Jepang menargetkan ODA mencapai 70 sampai 75 miliar dolar pada tahun 1997.

Pada dasarnya Jepang memberikan ODA berdasarkan target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kuantitas ODA Jepang cenderung mengalami peningkatan.

Selama masa Orde Baru, pelaksanaan ODA Jepang terhadap Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu:

#### **ODA Jepang pada Masa Kenaikan Ekonomi Jepang (1966-1972)**

Memasuki tahun 1966, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pada tahun 1967, Jepang menetapkan rencana pembangunan ekonomi dan sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas perekonomian Jepang (Yoshioka et.al., 2016: 22-23). Hal ini dilakukan dengan berbagai cara seperti pengurangan kesenjangan berbagai sektor industri, menjaga stabilitas harga yang menunjang pembangunan ekonomi, serta memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jepang.

Pada tahun 1970 yaitu tiga tahun setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, Jepang berhasil meningkatkan pertumbuhannya, bahkan menjadi negara kedua dengan *Gross National Product (GNP)*<sup>2</sup> terbesar setelah Amerika (Yoshioka et.al., 2016: 23). Hal ini membuat status Jepang di mata internasional semakin meningkat, sehingga Jepang semakin dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam penyelesaian berbagai masalah internasional, termasuk dalam peningkatan kesejahteraan dunia internasional.

---

<sup>2</sup> GNP adalah jumlah pendapatan total ekonomi suatu negara dalam satu tahun, termasuk nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk negara tersebut baik di dalam maupun di luar negeri.

Selama tahun 1966 hingga 1972, Indonesia menjadi negara prioritas Jepang sebagai penerima ODA hanya pada tahun 1967, 1970, dan 1972. ODA yang diterima Indonesia sempat mengalami penurunan karena Jepang memprioritaskan India pada tahun 1966 dan 1968, serta memprioritaskan Korea Selatan pada tahun 1969 dan 1971. Kemudian pada tahun 1972 jumlah ODA Jepang yang diterima Indonesia sedikit mengalami penurunan meskipun Indonesia masih menjadi prioritas Jepang karena Jepang mengurangi jumlah hibah yang diberikan kepada Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Jepang yang mengalami peningkatan pada akhir tahun 1960-an hingga memasuki 1970-an membuat dunia menaruh harapan pada Jepang untuk meningkatkan kontribusinya melalui peningkatan jumlah ODA. Pada tahun 1970, Jepang telah sepenuhnya membayar pampasan perang kepada Indonesia sejumlah sekitar 223.080.000 dolar (Maruyama, 1979: 108). Dengan berakhirnya pembayaran pampasan perang kepada Indonesia, Jepang berusaha untuk semakin meningkatkan kuantitas ODA. Bahkan pada tahun 1972, Jepang menjadi negara keempat pendonor ODA terbesar di dunia (MOFA, 2014: 3).

#### **ODA Jepang pada Masa Krisis Minyak (1973-1979)**

Pada tahun 1973 hingga 1979 Jepang mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonominya yang dipengaruhi oleh krisis minyak. Pada akhir tahun 1973 terjadi kenaikan harga minyak, yang awalnya \$3 per drum pada Januari 1973 naik menjadi \$12 pada Januari 1974 (Togo, 2010: 292). Harga minyak yang naik empat kali lipat dalam waktu setahun tersebut menyebabkan pertumbuhan perekonomian Jepang terhambat. Krisis minyak kedua terjadi pada tahun 1978-1979. Krisis minyak kedua juga berdampak pada kondisi ekonomi Jepang karena Jepang merupakan negara industri yang membutuhkan minyak.

Meskipun Jepang mengalami berbagai kesulitan pada tahun 1973 hingga 1979, Jepang tetap memberikan bantuan kepada Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 1974 hingga 1979, Indonesia menjadi negara penerima ODA Jepang terbanyak. Pada tahun 1974, jumlah ODA Jepang secara keseluruhan meningkat sebanyak 11,4% dibanding tahun sebelumnya (Ando et.al., 2009: 258). Hal ini tentunya memengaruhi peningkatan jumlah ODA yang diterima Indonesia. Pada tahun 1977, Jepang membuat rencana untuk meningkatkan kuantitas bantuan. Jepang memberikan bantuan kepada negara berkembang khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun 1978, total ODA Jepang secara keseluruhan meningkat signifikan sebanyak 55,5% (Ando et.al., 2009: 305). Berdasarkan data dari DAC, total ODA Jepang sebanyak 12,1% di antara 17 negara anggota DAC. Pada tahun tersebut, jumlah ODA Jepang yang diberikan Indonesia juga mengalami peningkatan.

Pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, hampir sebanyak 70% jumlah ODA Jepang didistribusikan kepada berbagai negara di kawasan Asia (Doherty, 1987: 138). Pada tahun tersebut, Jepang lebih mengencakan pelaksanaan kerja sama teknik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara berkembang (Gaimushou, 1997: 11). Hal ini menunjukkan tingginya perhatian Jepang untuk menjaga hubungan dengan negara berkembang yang secara geografis berdekatan dengan Jepang dan berada dalam satu kawasan, yaitu Asia.

Dalam memberikan ODA, Jepang membatasi negara penerima bantuan agar hanya menerima investasi dari perusahaan Jepang dan tidak menerima investasi asing dari negara lain atau yang dikenal dengan istilah *tied aid* (Hoshiyama, 2006: 3). Karena pada masa ini hampir semua bantuan Jepang bersifat *tied aid*, dapat disimpulkan bahwa pada masa tersebut ODA Jepang mendukung pemulihan dan peningkatan perekonomian Jepang. Namun memasuki tahun 1978, Jepang berusaha meningkatkan kuantitas bantuan yang tidak mengikat negara penerima ODA dalam menerima investasi asing atau yang disebut *untied aid*.

#### **ODA Jepang pada Masa Ekonomi Gelembung (1980-1991)**

Pada tahun 1980, Jepang tetap berada pada kondisi perekonomian yang baik, bahkan semakin meningkatkan kontribusi pada dunia internasional melalui ODA terutama pada akhir tahun 1980-an dikarenakan kenaikan nilai yen (Gaimushou, 1988: 27). Sejak September 1985, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dibandingkan dengan tahun 1985, pada tahun 1986 nilai yen Jepang meningkat sebesar 4,8%, dan kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 1987 sebesar 13,5%, sehingga Jepang dapat meningkatkan kontribusi dalam bentuk ODA. Pada tahun 1986, ODA Jepang naik sebesar 15,4%, dan tahun 1987 meningkat sebesar 18,1%. Berdasarkan data DAC, Jepang yang awalnya berada di urutan 14 pada tahun 1986 sebagai pemberi ODA, naik menjadi urutan 12 pada tahun 1987 (Gaimushou, 1988: 1). Karena kenaikan ODA Jepang tersebut, tahun 1987 disebut sebagai 'Tahun Jepang' oleh DAC. Sejak nilai yen meningkat, Jepang meningkatkan investasinya dengan fokus pada bidang otomotif, listrik, dan sebagainya.

Pada tahun 1987, GNP Jepang berhasil melebihi GNP dunia internasional hingga lebih dari 10% sehingga Jepang berada di posisi kedua setelah Amerika sebagai negara yang memiliki kekuatan dalam bidang ekonomi (ESRI, 1970: 30). Bahkan pada tahun 1988, rencana anggaran Jepang untuk ODA melebihi rencana anggaran ODA Amerika (ESRI, 1970: 3). Hal ini membuat Jepang menjadi negara pendonor ODA terbesar di dunia. Pada masa tersebut sebanyak 65% ODA Jepang dalam bentuk pinjaman diberikan kepada negara kawasan Asia (ESRI, 1970: 34).

Hal tersebut menyebabkan Jepang dapat terus melanjutkan ekspansi terhadap kualitas dan kuantitas ODA kepada dunia internasional. Pada tahun 1980 hingga 1983, meskipun kuantitas ODA Jepang yang diterima Indonesia mengalami penurunan dan kenaikan, selama tahun tersebut Indonesia tetap menjadi penerima ODA Jepang terbanyak. Pada tahun 1983 Jepang menjadi negara pemberi ODA terbesar ketiga setelah Amerika dan Perancis (Ando et.al., 2009: 340). Pada tahun 1984 Jepang menjadi negara peringkat kedua pemberi ODA setelah Amerika dan ODA Jepang meningkat sebanyak 14,8% (Ando et.al., 2009: 346). Pada tahun 1985, jumlah ODA Jepang menurun sebanyak 12,1% (Ando et.al., 2009: 353). Pada tahun 1984 dan 1985, Jepang lebih memprioritaskan China dalam memberikan ODA, sehingga Indonesia menjadi penerima ODA Jepang terbesar setelah China pada dua tahun tersebut. Meskipun total keseluruhan ODA Jepang meningkat pada tahun 1984 dan menurun pada tahun 1985, jumlah ODA yang diterima Indonesia tahun 1984 dan 1985 mengalami penurunan. Pada tahun 1986, meskipun Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai penerima ODA Jepang setelah Filipina dan China, jumlah ODA yang diterima Indonesia mengalami peningkatan karena didukung oleh

kebijakan Jepang dalam menambah total ODA.

Pada tahun 1987 hingga 1989, Indonesia menjadi negara prioritas Jepang dalam menerima ODA. Selain kuantitas ODA Jepang yang secara keseluruhan mengalami peningkatan, jumlah ODA yang diterima Indonesia juga meningkat dengan drastis. Bahkan dibandingkan dengan China yang menerima ODA Jepang terbanyak setelah Indonesia pada masa itu, selisih jumlah ODA yang diterima besar. Misalnya, seperti yang disampaikan oleh koran *Nihon Keizai*, pada tahun 1987 Indonesia menerima ODA dari Jepang sejumlah 941,14 juta dolar, sedangkan China menerima sebanyak 553,12 juta dolar. Hingga akhir tahun 1980-an, Jepang terus meningkatkan kuantitas ODA. Bahkan pada tahun 1989, Jepang menjadi negara pemberi ODA tertinggi di antara negara anggota DAC untuk pertama kalinya.

Tahun 1990, ODA Jepang meningkat sebanyak 2,9%, akan tetapi ODA Amerika lebih tinggi, sehingga pemberi ODA terbanyak bukan lagi Jepang, melainkan Amerika (Ando et.al., 2009: 387). Namun pada tahun 1991, Jepang kembali menjadi pendonor ODA terbanyak di dunia yaitu 11.034 juta dolar (Gaimushou, 1992: 17). Dikarenakan terjadi Perang Teluk dan untuk menjaga stabilitas di daerah tersebut, Jepang meningkatkan jumlah ODA kepada negara kawasan Timur Tengah seperti Irak, Turki, Yordania, Mesir, dan lain-lain (Kusano, 1993: 47). Meskipun demikian, Jepang tetap memberikan ODA kepada Indonesia yang bahkan jumlahnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

#### **ODA Jepang pada Masa Krisis Ekonomi (1992-1998)**

Pada awal tahun 1992, perekonomian Jepang mulai memburuk. Periode ini dikenal dengan istilah *lost decade*. Pada tahun 1989, rata-rata harga saham per bulan adalah 38.915 yen, kemudian pada tahun 1992 menjadi 14.309 yen (ESRI, 1970: 29). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Jepang semakin menurun sebanyak tiga kali lipat.

Memasuki tahun 1992 setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1991, ODA Jepang mulai difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia (Nishigaki, 2003: 83). Jepang memasuki masa baru dalam membuat kebijakan pelaksanaan ODA. Pada tahun 1992, jumlah ODA Jepang menjadi dua kali lipat dari tahun 1985. Hal ini karena pada tahun 1985 Jepang menargetkan ODA jangka menengah-panjang ketiga yang direncanakan dijalankan selama 7 tahun dari tahun 1985 hingga 1992 (Nagano, 1986: 272). Jepang berhasil mewujudkan target ODA sesuai dengan rencana. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun 1992 Jepang menjadi negara pemberi ODA terbesar sedunia. Sebanyak 65,1% ODA Jepang diberikan pada Asia (Ando et.al., 2009: 407). Indonesia sebagai negara penerima ODA Jepang terbanyak juga menerima ODA dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Namun pada tahun 1993 dan 1994, ODA Jepang yang diterima Indonesia berkurang. Akan tetapi jumlah ODA Jepang secara keseluruhan pada tahun 1993 meningkat sebanyak 1,3% dan tahun 1994 meningkat 17,6% (Ando et.al., 2009: 415-423). Pada tahun 1993, terjadi *enjo tsukare* atau kelelahan dalam memberikan bantuan yang menyebabkan penurunan jumlah bantuan di antara negara pendonor ODA. Namun hal ini tidak berlaku bagi Jepang karena Jepang dapat meningkatkan jumlah ODA pada saat itu. Kuantitas ODA yang diterima Indonesia menurun dikarenakan Jepang lebih fokus memberikan bantuan kepada negara kawasan Afrika. Hal ini tampak pada pelaksanaan *Tokyo International*

*Conference on African Development* (TIDAC) oleh pemerintah Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dunia internasional dalam meningkatkan bantuan bagi Afrika (Sawamura, 2004: 34).

Pada tahun 1995 dan 1996, kuantitas ODA Jepang kepada Indonesia kembali mengalami kenaikan. Tahun 1995 jumlah ODA meningkat sebanyak 9,3%, sedangkan tahun 1996 mengalami penurunan sebanyak 34,9% (Ando et.al., 2009: 432-439). Meskipun demikian, Indonesia tetap menerima ODA Jepang dalam jumlah yang besar.

Pada tahun 1997 jumlah ODA Jepang kepada Indonesia mengalami penurunan drastis. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997. PM Hashimoto (1996-1998) mengambil kebijakan untuk mengurangi kuantitas ODA karena Jepang mengalami kesulitan ekonomi (Togo, 2010: 322). Meskipun demikian, sejak tahun 1991, Jepang selama 7 tahun tetap menjadi pendonor ODA terbanyak berturut-turut (Togo, 2010: 440). Pada tahun 1998, meskipun Jepang mengurangi anggaran ODA sebesar lebih dari 10% (Uriu, 1999: 122), jumlah ODA yang diterima Indonesia kembali meningkat.

Meskipun Jepang mengalami masa *lost decade*, Jepang tetap mampu memberikan ODA kepada Indonesia. Bahkan Jepang dapat berusaha memenuhi targetnya untuk selalu meningkatkan kuantitas ODA.

### **Peranan ODA Jepang bagi Jepang dan Indonesia**

Jepang memiliki beberapa alasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara prioritas penerima ODA Jepang. Jepang menjalin kerja sama ekonomi dalam bentuk ODA kepada Indonesia karena (MOFA, 1999):

1. Indonesia dari segi politik dan ekonomi merupakan negara yang penting bagi Jepang,
2. Jepang dan Indonesia memiliki hubungan saling ketergantungan yang erat dalam hal perdagangan dan investasi,
3. Secara geografis, Indonesia memiliki posisi yang strategis bagi Jepang dalam bidang maritim dan transportasi laut,
4. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, dan sumber alam lainnya,
5. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara, sehingga Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara sebagai anggota ASEAN,
6. Indonesia memerlukan ODA untuk mengurangi angka kemiskinan dan membangun perekonomian negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat dua hal yang menjadi alasan utama Jepang melaksanakan ODA di Indonesia, yaitu dalam hal perbaikan citra Jepang di mata dunia internasional serta investasi dan perdagangan.

Perbaikan citra diwujudkan dengan menunjukkan perhatian lebih terhadap negara di Asia Tenggara melalui kunjungan serta pembuatan kebijakan untuk memperlancar hubungan Jepang dengan ASEAN. Misalnya, pada tahun 1977, PM Fukuda Takeo (1976-1978) menetapkan kebijakan yang dikenal dengan Doktrin Fukuda.

Kebijakan tersebut menyatakan bahwa (Togo, 2010: 201):

1. Jepang tidak akan menjadi negara dengan militer yang kuat;
2. Jepang akan membangun relasi berdasar pada 'hati ke hati' dan tidak hanya dalam hubungan politik-ekonomi namun juga sosial-budaya; serta
3. Jepang akan berkontribusi yang positif dalam memperkuat intra-regional ASEAN dan dalam membangun hubungan dengan negara Indochina.

Kebijakan Fukuda tersebut menunjukkan usaha Jepang untuk mempererat hubungan dengan negara Asia Tenggara. Kebijakan ini, terutama poin ketiga, berhasil memberikan kesan positif kepada negara-negara kawasan Asia Tenggara. Implementasi doktrin tersebut salah satunya ditunjukkan dengan cara penambahan kuantitas ODA Jepang yang diberikan kepada negara-negara Asia Tenggara. Hal ini terbukti bahwa pada tahun berikutnya yaitu tahun 1978, jumlah ODA Jepang yang diterima Indonesia mengalami peningkatan.

Pada tahun 1987, PM Takeshita (1987-1989) pertama kali mengunjungi negara-negara di ASEAN. Dalam waktu tiga tahun, Jepang akan meningkatkan bantuan menjadi dua miliar dolar dalam upaya pengembangan hubungan Jepang dan ASEAN pada bidang budaya dan moral (Ando et.al., 2009: 368). Selain dipengaruhi oleh kenaikan nilai yen yang menyebabkan Jepang dapat memberikan bantuan yang lebih besar kepada negara berkembang, pemerintah Jepang juga membuat kebijakan untuk mempererat hubungan Jepang dan negara anggota ASEAN tidak hanya dalam bidang politik dan ekonomi namun juga dalam bidang sosial dan budaya. Melalui kebijakan ini, Jepang berharap agar semakin mendapatkan kembali kepercayaan dari negara bekas jajahannya di Asia Tenggara.

Jepang juga melaksanakan kerja sama ekonomi baik melalui investasi maupun kegiatan ekspor-impor di Indonesia. Jepang merupakan salah satu negara yang banyak melakukan investasi asing di Indonesia. Berdasarkan data tahun 1986, investasi asing Jepang di Indonesia sebagian besar berfokus pada industri (43,9%) dan tekstil (25,9%) (Ando et.al., 2009: 345). Selain dua bidang tersebut, terdapat pula sektor kehutanan, kimia, serta barang logam. Jepang banyak membangun perusahaan terutama perusahaan mobil, truk, motor, radio, televisi, dan sebagainya.

Pada akhir tahun 1980-an, jumlah investasi asing yang dilaksanakan perusahaan Jepang di kawasan Asia meningkat karena terjadi kenaikan harga yen di Jepang (Watanabe, 1993: 10). Jika Jepang hanya mengembangkan perusahaannya di dalam negeri, nilai yen tidak memiliki arti apa pun. Akan tetapi, jika Jepang mengembangkan investasi di luar negeri, dalam hal ini yang dimaksud adalah negara berkembang di Asia, perusahaan Jepang dapat memperoleh keuntungan yang berlipat. Dengan menggunakan yen di luar negeri, Jepang dapat membeli tanah yang lebih luas, dapat membayar para pekerja lebih murah, dan dapat memperoleh bahan dasar yang juga lebih murah dibandingkan di Jepang (Watanabe, 1993: 10-11). Kenaikan nilai yen menguntungkan Jepang dalam berinvestasi.

Dalam hal perdagangan seperti impor sumber alam, bagi Jepang, Indonesia merupakan negara keempat pemberi impor terbesar setelah Amerika, China, dan Australia. Jepang banyak mengimpor minyak mentah, gas alam, dan sebagainya dari Indonesia (Watanabe, 1993: 87). Bahkan Indonesia merupakan negara ketiga pengeksport minyak mentah

kepada Jepang setelah Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia (Gaimushou, 1992: 21). ODA menguntungkan Jepang yang jumlah sumber alamnya sedikit untuk menjalin hubungan interdependensi dengan negara berkembang terutama yang kaya akan sumber alam. Jepang perlu menjalin hubungan bidang ekonomi yang baik dengan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan negara berupa sumber alam yang berperan besar dalam mendukung kemajuan teknologi Jepang.

Kebijakan ODA Jepang yang berperan dalam memperbaiki citra Jepang di mata Indonesia dan dunia internasional, serta dalam meningkatkan investasi dan perdagangan Jepang tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ODA Jepang memiliki keterkaitan dengan kepentingan nasional Jepang. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional merupakan kemampuan negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama atau konflik, yang biasanya fokus dalam hal keamanan dan kesejahteraan (Morgenthau, 1951). Jepang berusaha memenuhi kepentingan nasional melalui kerja sama dengan Indonesia untuk menjamin masa depan Jepang baik dari segi keamanan atau stabilitas Jepang di dunia internasional, serta kesejahteraan Jepang yang diwujudkan dalam pengembangan perekonomian Jepang

ODA Jepang berperan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Terdapat lima hal penting yang perlu diprioritaskan Jepang dalam melaksanakan kerja sama ekonomi ODA dengan Indonesia (Thee, 1978: 10), yaitu:

1. Penyediaan lapangan pekerjaan,
2. Pembangunan perekonomian pada wilayah Indonesia secara merata di luar pulau Jawa,
3. Peningkatan partisipasi masyarakat Indonesia dalam usaha meningkatkan perekonomian Indonesia, serta
4. Peningkatan pemerataan pembangunan.

Selain mengutamakan hal di atas, kontribusi dalam hal penerimaan ekspor, penghematan investasi asing, penggunaan bahan dasar produksi dalam negeri, pemberian bantuan nilai tambah, serta pemberian ilmu teknologi baru juga perlu diutamakan (Thee, 1978: 10). Selama masa Orde Baru, Jepang telah melaksanakan berbagai proyek pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dalam penyiaran, telekomunikasi, jalan raya, pelabuhan, dan sebagainya. ODA Jepang tersebut cenderung berupa pinjaman yang membantu peningkatan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur energi dan transportasi. Namun pinjaman dalam pembangunan infrastruktur sosial rendah. Hal ini karena pembangunan infrastruktur sosial menghasilkan keuntungan ekonomi yang rendah, sehingga sebagian besar ODA berupa hibah digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan sebagainya (Kawasaki, 2004: 4).

Proyek ODA Jepang juga berupa pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui investasi Jepang.

Sejak pertengahan tahun 1980-an Indonesia semakin meningkatkan perekonomiannya melalui promosi ekspor dan penerimaan investasi asing (Government of Japan, 2004: 2). Hal ini membantu peningkatan perekonomian Indonesia. Dalam penerimaan investasi Jepang, selain terdapat maksud dari Jepang untuk melaksanakan investasi, Indonesia juga memiliki alasan untuk menerima investasi tersebut yaitu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan cara memperoleh pengetahuan terkait modal asing serta bidang teknologi (Thee, 1978: 9).

Pada tahun 1985, ditetapkan bahwa sebanyak 51% perusahaan Jepang harus bergabung dengan perusahaan Indonesia (Thee, 1978: 36). Proyek yang dikenal dengan istilah *joint venture* ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat Indonesia dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Namun pada tahun yang sama, Jepang mendapat kritikan dari ASEAN mengenai paham *trade protectionism*<sup>3</sup> Jepang (Ando et.al., 2009: 347).

Meskipun Jepang dianggap menganut paham *trade protectionism* dan dikatakan telah banyak merebut para pekerja Indonesia dengan sumber manusia yang berkualitas, di sisi lain Jepang telah berkontribusi dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pemberian pelatihan dan ilmu pengetahuan teknologi kepada para pekerja Indonesia yang bekerja di perusahaan Jepang (Thee, 1978: 32).

Selain dari perusahaan Jepang, pelatihan teknik yang dilaksanakan pemerintah Jepang kepada Indonesia untuk tujuan pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang bahkan sudah dimulai sejak tahun 1954 sebelum ODA dilaksanakan dan sebelum JICA dibentuk (Alam, 2001: 13). Sejak tahun 1984 hingga 1998, sebanyak lebih dari 500 peserta setiap tahunnya mengikuti pelatihan yang dilaksanakan JICA di Indonesia sebagai wujud kerja sama teknik ODA Jepang (JICA, 2018: 32). Peningkatan kualitas sumber daya manusia, selain melalui pelatihan dalam perusahaan Jepang, juga dapat berupa pemberian beasiswa kepada pelajar Indonesia. Pada tahun 1989, banyak pelajar Indonesia yang menerima beasiswa dari Jepang dan belajar mengenai teknologi di Jepang (Gaimushou, 1992: 114).

ODA Jepang telah berkontribusi dalam berbagai pembangunan di Indonesia. Meskipun Jepang banyak mendapat kritikan yang menyatakan bahwa Jepang mengambil keuntungan yang besar dalam investasi asing melalui pelaksanaan ODA, bagi Jepang proyek ODA sebenarnya menumbuhkan kemitraan. ODA Jepang dilaksanakan atas kesepakatan bersama dari Jepang serta negara penerima ODA, sehingga dapat dikatakan bahwa pada akhirnya proyek ODA dilaksanakan bersama oleh kedua pihak (Ise, 1991: 19).

Dalam pelaksanaan ODA Jepang, tidak hanya terdapat kepentingan nasional Jepang, namun juga terdapat hubungan interdependensi antara Jepang dan Indonesia. Jepang memberikan ODA kepada Indonesia untuk dapat menjalin kerja sama ekonomi dengan mudah, sehingga Jepang dapat memperluas pasar ekspor ke Indonesia. Kemudian, Indonesia membutuhkan ODA Jepang untuk mendukung pembangunan berbagai infrastruktur, serta untuk mendorong pertumbuhan investasi dari Jepang, karena hal tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Ini

---

<sup>3</sup> *Trade protectionism* adalah kebijakan untuk melindungi pasar domestik dengan cara membatasi investasi asing atau impor dari negara lain.

membuktikan bahwa terdapat kepentingan antara kedua negara, sehingga muncul hubungan timbal balik antara Jepang dan Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan teori interdependensi menurut Robert O. Keohanne dan Joseph S. Nye, yang menyatakan bahwa hubungan interdependensi atau saling ketergantungan dalam politik internasional mengacu pada situasi yang ditandai oleh efek timbal balik antar negara atau antar aktor di negara yang berbeda dalam hubungan internasional. Efek ini sering dihasilkan dari transaksi internasional, misalnya aliran uang, barang, orang, dan pesan, yang melintasi batas-batas internasional (Keohanne dan Nye, 2012: 7). Dalam hubungan Jepang dan Indonesia melalui pelaksanaan proyek ODA, dapat diketahui bahwa ODA yang berupa aliran uang, yang disertai dengan aliran barang, orang, dan pesan atau informasi, memberikan efek timbal balik antara Jepang dan Indonesia. ODA Jepang menjadi instrumen dalam menjalin hubungan timbal balik antara Jepang dan Indonesia, karena melalui pelaksanaan ODA, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara.

Robert O. Keohanne dan Joseph S. Nye juga menyatakan untuk tidak mendefinisikan interdependensi sebagai situasi ketergantungan timbal balik yang seimbang. Asimetri dalam hubungan interdependensi adalah yang paling mungkin menjadi sumber pengaruh bagi para aktor dalam hubungan mereka satu sama lain (Keohanne dan Nye, 2012: 9). Dalam hal pelaksanaan ODA Jepang di Indonesia, ODA Jepang tidak memberikan hubungan timbal balik yang seimbang antara kedua negara, dan merupakan hal yang wajar jika muncul hubungan timbal balik yang cenderung asimetri. Jepang memprioritaskan Indonesia sebagai salah satu negara penerima ODA Jepang terbesar, dan Jepang cenderung memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia. Hal tersebut dapat dirasakan dengan maraknya produk buatan Jepang, karena pesatnya pertumbuhan pasar dari perusahaan Jepang di Indonesia. Meskipun terdapat hubungan timbal balik yang asimetri yang tidak dapat dihindari, secara keseluruhan ODA Jepang memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi kedua negara.

## KESIMPULAN

Selama masa Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998, Jepang cenderung mengutamakan Indonesia sebagai negara penerima ODA Jepang. Jepang memprioritaskan Indonesia sebagai penerima ODA Jepang karena Jepang memiliki kepentingan nasional dalam hal tersebut. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan Indonesia memiliki posisi penting di mata Jepang, yaitu untuk perbaikan citra Jepang baik di mata Indonesia maupun di mata dunia internasional, serta untuk peningkatan investasi dan perdagangan Jepang di negara penerima ODA Jepang.

Jepang berusaha memperbaiki citranya terutama di mata negara bekas jajahannya pada masa Perang Dunia II, seperti Indonesia. ODA berhasil membuat Jepang semakin dipandang dunia internasional terutama ketika Jepang menjadi negara pendonor ODA terbanyak sedunia. ODA dianggap oleh dunia internasional sebagai kontribusi nyata Jepang untuk pengembangan ekonomi negara berkembang.

Dalam hal peningkatan investasi dan perdagangan internasional, Indonesia memiliki

peranan penting bagi Jepang. Kebijakan ODA Jepang yang diikuti dengan pengembangan investasi serta kerja sama ekspor-impor menguntungkan Jepang dalam menjaga pertumbuhan ekonomi negaranya. Proyek ODA Jepang juga cenderung berkaitan dengan pertumbuhan investasi Jepang di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga kaya sumber daya alam sehingga memudahkan Jepang untuk mengimpor sumber alam, serta memiliki letak geografis yang strategis sebagai jalur perdagangan, terutama Selat Malaka. Hal tersebut menunjukkan bahwa ODA dapat memenuhi kepentingan nasional Jepang dalam hal perbaikan citra dan pengembangan ekonomi melalui investasi serta perdagangan.

Selain memiliki peranan dalam mengembangkan perekonomian Jepang, sesuai dengan tujuan utama pelaksanaan ODA, ODA Jepang berperan dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Proyek ODA Jepang telah mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Investasi Jepang juga membantu Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara serta menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga membutuhkan ODA Jepang.

ODA memberikan dampak yang positif dalam menjaga hubungan diplomasi antara Jepang dan Indonesia. ODA sebagai kerja sama ekonomi telah terbukti dapat mempererat hubungan Jepang dan Indonesia hingga sekarang. Bagi Jepang, pelaksanaan ODA di Indonesia tidak hanya untuk pengembangan perekonomian Jepang, namun Indonesia juga membutuhkan ODA Jepang sehingga terjalin hubungan interdependensi atau hubungan timbal balik antara Jepang dan Indonesia. Dengan bekerja sama untuk saling memenuhi kepentingan nasional Jepang dan Indonesia, pelaksanaan ODA diharapkan dapat terus menjadi kerja sama yang saling menguntungkan kedua negara dan dapat mempererat hubungan kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Bachtiar (2001). *Japan's ODA to Indonesia: Statistical Data*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ando, M., Wakabayashi, T., Horie, S. (2009). *Nihon Kokusai Kouryushi Jiten Topikkusu 1953-2008*. Tokyo: Nichigai Associates.
- Doherty, Eileen Marie (1987). "Japan's Expanding Foreign Aid Program". *Asian Affairs (an American Review)* 14 (3), 129-149.
- ESRI (1970). *Nendai Ikou no Nihon Keizai no Doukou to Juuyou na Topikkusu*. Naikakufu.
- Gaimushouu Keizai Kyouryoku Kyoku (1988). *Wa ga Kuni Seifu Kaihatsu Enjo*. Tokyo: Zaidan Houjin Kokusai Kyouryoku Suishin Kyokai.
- Gaimushouu Keizai Kyouryoku Kyoku (1992). *Wa ga Kuni no Seifu Kaihatsu Enjo*. Tokyo: Zaidan Houjin Kokusai Kyouryoku Suishin Kyokai.
- Gaimushouu Keizai Kyouryoku Kyoku (1994). *Wa ga Kuni no Seifu Kaihatsu Enjo*. Tokyo: Zaidan Houjin Kokusai Kyouryoku Suishin Kyokai.
- Government of Japan (2004). *Country Assistance Program for the Republic of Indonesia*.
- Hoshiyama, Takashi (2006). "Wa ga Kuni Seifu Kaihatsu Enjo (ODA) no Isou: Enjo no Tagensei to Kokueki". *IIPS Policy Paper* 318J.
- Ise, Momoyo (1991). *Touron Shuukai Shirizu 100: ODA no Genjou to Kongo no Tenbou*.

- Tokyo: Shinseisha.
- Jackson, R. & Sorensen, G. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- JICA (2018). *Indonesia's Development and Japan's Cooperation: Building the Future Based on Trust*.
- Kawasaki, Kenichi (2004). "The Impact of Japanese Economic Cooperation on Asian Economic Development". *Review of Urban & Regional Development Studies* 16 (1), 14-32.
- Keohane, Robert dan Nye, Joseph (2012). *Power and Interdependence* (4<sup>th</sup> Edition). Boston: Longman.
- Thee, Kian-Wee (1978). *Indonesia ni Taisuru Nihon no Chokusetsu Tousei*. Tokyo: Ajia Keizai Kenkyusho.
- Kusano, Jun (1993). *ODA Ichou Ni Sen Oku En no Yukue*. Tokyo: Touyou Keizai Shinpousha.
- Maruyama, Katsuhiko (1979). *Nihon Indonesia Kankei Nenpyou*. Tokyo: Meiji Tosho Shuppan.
- Morgenthau, H. J. (1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: University Press of America. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000271625227900124>, diakses pada 20 Maret 2018.
- MOFA (2014). *Japan's Official Development Assistance White Paper 2014: The Track Record of Japan's ODA*.
- MOFA (1999) *Japan's ODA in Indonesia*. 1999. [http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1999/ref3\\_01.html#Indonesia](http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1999/ref3_01.html#Indonesia), diakses pada 21 Desember 2018.
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. *Reparation Agreement Between Japan and the Republic of Indonesia*. 1958. [http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1499\\_JPN-1958-0007.pdf](http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/1499_JPN-1958-0007.pdf), diakses pada 11 Desember 2017.
- MOFA (2004). *Country Assistance Program for the Republic of Indonesia*. [http://www.mofa.go.jp/policy/oda/region/e\\_asia/indonesia.pdf](http://www.mofa.go.jp/policy/oda/region/e_asia/indonesia.pdf), diakses pada 10 Desember 2017.
- MOFA. *Official Development Assistance (ODA)*. <http://www.mofa.go.jp/policy/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/progress2.html>, diakses pada 21 Desember 2018.
- Nagano, Nobutoshi (1986). *Nihon Gaiko no Subete*. Tokyo: Gyosei Mondai Kenkyusho Shuppanyoku.
- Nihon Keizai Shinbun. *Indonesia Tokushuu: Kokkou 60 Nen Enjo kara Kyouryoku e*. 21 Mei 2018.
- Nihon Keizai Shinbun. *ODA Mappu de Miru: Nihon to Tojokoku no Henka*. <https://vdata.nikkei.com/prj2/postwar70-oda/>, tanggal 25 Juli 2019.
- Nishigaki, A., Shimomura, Y., Tsuji, K. (2003). *Kaihatsu Enjo no Keizai Gaku Dai San Hen: Kyosei no Sekai to Nihon no ODA*. Tokyo: Yuhikaku.

- OECD. *Official Development Assistance*.  
<http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm>, diakses pada 28 Agustus 2019.
- Sakata, Kazuko (2015). "Wa ga Kuni no Arata na Kaihatsu Enjo Seisaku: Enjo o Meguru Kokusaiteki Kankyou no Henka o Fumaete". *Refarensu Heisei Nijuunana Rokugatsu Gou*, Kokuritsu Kokkai Toshokan.
- Sawamura, Nobuhide (2004). "Japan's Philosophy of Self-Help Efforts in International Development Cooperation: Does It Work in Africa?". *Journal of International Cooperation in Education* 7 (1), 27-40.
- Scott, S. (2015). *The Accidental Birth of "Official Development Assistance"*. OECD Development Co-operation Working Papers No. 24 OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/5jrs552w8736-en>, diakses pada 19 Maret 2018.
- Uriu, Robert (1999). "Japan in 1998: Nowhere to Go but Up?". *Asian Survey* 39 (1), 114-124.
- Togo, Kazuhiko (2010). *Japan's Foreign Policy 1945-2009: The Quest for a Proactive Policy*. Leiden: Brill.
- Wakaizumi, Kei (1969). "Japan Beyond 1970". *Foreign Affairs* 47 (3), 509-520.
- Wan, Ming (2016). *Japan Between Asia and the West: Economic Power and Strategic Balance*. London: Routledge.
- Watanabe, Yoshio (1993). *Touron Shuukai Shiriizu 118: Ajia no Keizai Hatten to Nihon*. Tokyo: Shinseisha.
- Yoshioka, S. dan Kawasaki, H. (2016). "Japan High-Growth Economic Postwar Period: The Role of Economic Plan". *ESRI Research Note No. 27*. Cabinet Office.